

## Strategi Optimalisasi Baitul Mal Dalam Meningkatkan Financial Inclusion di Kota Medan

Maryam Batubara<sup>1</sup>, Purnama Ramadani<sup>2</sup>, Gita Kurnia Sari Sembiring<sup>3</sup>, Sallimah Ika Putri Malau<sup>4</sup>, Arpin Dalimunthe<sup>5</sup>  
Rizky Ananda Ariza,<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[Maryam.batubara@uinsu.ac.id](mailto:Maryam.batubara@uinsu.ac.id), [purnamaramadani@uinsu.ac.id](mailto:purnamaramadani@uinsu.ac.id)  
[gitakurniasari025@gmail.com](mailto:gitakurniasari025@gmail.com), [sallimahikaputrimalau3@gmail.com](mailto:sallimahikaputrimalau3@gmail.com)  
[arpindalimunthe926@gmail.com](mailto:arpindalimunthe926@gmail.com), [rizkyanandaaa1608@gmail.com](mailto:rizkyanandaaa1608@gmail.com)

### ABSTRACT

*Accelerating economic growth is a necessary condition for improving people's quality of life. Accelerating economic growth requires maximizing the financial sector's contribution through providing financial services to the largest potential public and enterprises, such as UMKM. That is, as part of measures to improve public welfare, efforts should be undertaken to boost the financial sector's role in the economy. Any initiative aiming at removing all price and non-price barriers to people's access to financial services is referred to as financial inclusion. BMT is a simple and cost-effective way for a company to reach the bottom layer and for a microfinance institution to meet the demand for loanable money (loan).*

**Keyword :** *Economic Growth, Financial Inclusion, UMKM, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Medan City*

### ABSTRAK

Percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Optimalisasi sumbangan sektor keuangan dengan mewariskan bab seluas-luasnya bagi masyarakat dan eksekutor usaha terhadap layanan keuangan, seperti UMKM, merupakan komponen signifikan dalam percepatan progres ekonomi. Artinya, divisi sektor keuangan dalam perekonomian harus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan adalah kata luas yang mengacu pada segala upaya untuk menghilangkan semua halangan harga dan non-harga atas akses publik ke layanan keuangan. BMT adalah cara bagi organisasi untuk mencapai lapisan bawah dan lembaga keuangan mikro untuk memenuhi permintaan dana pinjaman dengan cara yang paling hemat biaya dan mudah (pinjaman).

**Kata kunci :** *Pertumbuhan Ekonomi, Keuangan Inklusif, UMKM, BaitulMaal Wat Tamwil (BMT) kota Medan*

## PENDAHULUAN

Ketahanan nasional dan perlindungan ekonomi global dari dampak krisis tidak dapat disangkal merupakan prioritas penting bagi setiap sektor ekonomi. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa terdapat tautankausalitas yang substansial antara peneguhan pola keuangan atas perkembangan dan kelimpahan satu negara. Secara umum, strategi penanggulangan kemiskinan yang paling efektif adalah dengan mendapatkan kemajuan perniagaan yang tinggi dan terus menerus. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat strategis terpenting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Optimalisasi kontribusi sektor ini dengan memberikan pintu seluas-luasnya akan kelompok dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan, ibarat UMKM, merupakan komponen penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut laporan Bank Dunia, banyak orang Indonesia yang masih belum memiliki layanan keuangan. Masih banyaknya konsumen yang belum dapat mengakses layanan keuangan menunjukkan kinerja sistem keuangan yang belum optimal. Sistem keuangan yang ideal, di sisi lain, harus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Dampaknya terhadap perekonomian akan sangat besar jika mayoritas masyarakat mampu menggunakan fasilitas jasa keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan cara untuk memacu pemaiknaan bagian anggaran dalam perdagangan masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan menyeluruh keuangan, juga disebut sebagai inklusi keuangan atau inklusi keuangan kepada segala orang. Partisipatif dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah organisasi perbankan kecil yang sekaligus hemat biaya, serta cara paling nyaman bagi masyarakat menengah dan kecil untuk memperoleh kredit (sangkutan). Karena pinjam meminjam, serta tagihan, yaitu masalah yang tidak dapat ditangani melalui kegiatan ekonomi.

## TINJUAN LITERATUR

### a. Optimalisasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan optimal sebagai “terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan”. Pengoptimalan kata dapat dianggap memiliki kata dasar yang ideal. Penting untuk dilakukan proses optimasi atau optimasi, artinya memberikan nilai yang optimal pada apapun, agar dapat menghasilkan hasil yang optimal. Dari perspektif ini, optimasi dapat diterangkan menjadi suatu teknik atau aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh atau memperoleh kondisi terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan. Istilah "optimasi" mengacu pada proses berkonsentrasi pada aspek yang paling signifikan dari kehidupan seseorang. Seorang pelari profesional akan berusaha untuk mengalahkan waktu terbaiknya sendiri. Seorang programmer akan berusaha untuk membangun kode dan program yang lebih baik. Menyelesaikan sesuatu dengan dampak yang lebih luas dan lebih luas adalah inti dari pengoptimalan.

Menurut Ahmad Hasan Ridwan, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai optimalisasi:

- Pemerintah harus memberikan keleluasaan dalam membangun BMT secara sistematis
- BMT melakukan program pemberdayaan melalui pelatihan dan pembinaan
- BMT menyalurkan pinjaman modal usaha kepada kelompok usaha binaan
- BMT di bawah pemerintah supervisi dapat bekerjasama untuk memberikan pembinaan kepada usaha kecil menengah
- Pengembalian modal usaha yang disalurkan melalui BMT

**b. Financial Inclusion**

Inklusi keuangan merupakan faktor pendorong pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan antara lain menghilangkan hambatan akses masyarakat terhadap tabungan, kredit, sistem pelunasan, asuransi, dan dana purnabakti adalah contoh jasa. Akses ke layanan keuangan merupakan komponen penting dari upaya pengentasan kemiskinan. Wajar jika “9 Prinsip Inovasi Keuangan Inklusif” lahir pada KTT G-20 di Toronto pada Juli 2010. Kelompok Ahli Keuangan Inklusi yang dibentuk bagi G20 mengembangkan kesembilan prinsip tersebut menjadi serangkaian saran untuk meningkatkan pintu masyarakat miskin ke layanan keuangan dominasi, pluralitas serta kreativitas, perlindungan dan penguatan, kolaborasi antar lembaga, penggunaan kemahiran, memadai kebijakan, dan kerangka peraturan merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan, semuanya tercakup dalam bab kesembilan.

Kementerian Keuangan Indonesia juga menggunakan ringkasan prinsip tersebut sebagai acuan dalam penerapan keuangan inklusif. Dari sinilah muncul tujuan luas cara apa “mewujudkan sistem keuangan yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan”. Jelas banyak perwakilan yang harus diselesaikan. Misalnya, upaya untuk mengintegrasikan inklusi keuangan dalam pembangunan ekonomi yang lebih besar dan strategi pengurangan kemiskinan. Statistik menunjukkan bahwa kemiskinan dan akses ke layanan keuangan memiliki hubungan timbal balik, dengan keduanya silih memengaruhi. Selain itu, ada keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap perilaku keuangan yang sehat. Ini diterima mengingat berlebihan masyarakat Indonesia yang kurang tahu finansial. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Menciptakan inklusi keuangan dengan meningkatkan sinergi antara bank dan lembaga keuangan non-bank adalah tujuan lain yang ingin dicapai. Lembaga keuangan yang paling banyak dicakup adalah bank. Sektor perbankan akan menjadi tumpuan agenda inklusi keuangan. Sinergi bertahap bank dan pemberian keuangan non bank, salah satunya Lembaga Keuangan Mikro yang selama ini banyak melayani kelompok miskin dan UMKM, harus terus

digalakkan untuk menjembatani kesenjangan konsumen yang tidak terjangkau oleh perbankan.

Yang lebih penting adalah macam mana lembaga keuangan memberikan layanan juga produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, lembaga keuangan harus menilai setiap produk baru untuk memastikan benar memenuhi harapan masyarakat luas, terutama mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan atau layanan keuangan lainnya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah impian untuk menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh semua orang tanpa hambatan dapat terwujud. Inklusi keuangan tampaknya menjadi inisiatif yang sangat strategis untuk memperluas keterlibatan publik dalam sistem ekonomi sehingga hidup dan berkembang.

**c. Baitul Mal Wat Tamwil**

Karena masalah pinjam meminjam adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui kehidupan ekonomi, maka Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah organisasi keuangan mikro paling terjangkau dan cara termudah untuk memenuhi kebutuhan uang pinjaman. BMT cukup efektif mencegah bank-bank tradisional besar memikat dana dari desa dan kemudian meminjamkannya kepada konglomerat dan pengusaha kaya dalam skala kecil. Di sisi lain, keberadaan BMT telah membantu pemberantasan aktivitas lintah darat yang sudah berlangsung lama di masyarakat pedesaan. BMT didirikan dalam upaya untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial, khususnya dampak krisis keuangan global, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai Badan Kerja YINBUK (Yayasan Inkubasi Usaha Kecil), PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) telah mengambil inisiatif fundamental dan politik untuk memaksimalkan potensi ekonomi masyarakat. Langkah tersebut ditempuh dengan mendorong tumbuhnya pengusaha kecil dan menengah dengan mendirikan Baitul Maal Wat-Tamwil atau Pusat Usaha Mandiri Terpadu (BMT).

Sejauh ini, PINBUK telah berhasil mendorong terciptanya sekitar 2.990 di seluruh Indonesia (Bagian Data Pinbuk Pusat, 10/1999). PINBUK mendukung usaha kecil syariah, BMT, yang merupakan badan hukum yang menjalankan koperasi sesuai prinsip syariah. Dengan adanya bmt di banyak desa dan kota, setidaknya sendi-sendi perekonomian daerah berkembang lebih baik, misal pertanian, perdagangan, kerajinan rakyat, dan sektor informal lainnya. Bahkan usaha kecil yang tidak aktif diharapkan untuk bangkit kembali dengan bantuan kredit yang mudah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menangkap makna perilaku, simbol, dan fenomena dengan menggunakan metode kualitatif. Bentuk studi ini menggunakan

studi kasus yang lengkap, intens, ekstensif, dan mendalam yang lebih terfokus pada mempelajari masalah atau fenomena.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Konsep Baitul Mal Wat Tamwil dan Financial Inclusion

Sebutan Baitul Mal atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) akhir-akhir ini semakin populer, seiring dengan keinginan ummat akan ekonomi Islam dan solusi atas krisis ekonomi Indonesia yang telah dialami sejak 1997. Nama-nama ini biasanya digunakan untuk institusi tertentu (dalam perusahaan atau organisasi) yang mengumpulkan dan mendistribusikan pembayaran ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) dari karyawan atau karyawannya. Ungkapan tersebut juga berlaku bagi badan ekonomi berbentuk koperasi multi-usaha yang bergerak di beberapa bidang kegiatan ekonomi rakyat, seperti sosial, keuangan (simpan pinjam), dan perusahaan real estate. Lembaga keuangan syariah, khususnya BMT yang berhubungan langsung dengan usaha mikro, harus mulai memikirkan bagaimana mengelola usia produktif pengangguran. Dari segi jumlah, tentu ini merupakan potensi besar yang harus diwujudkan. Jumlah tahun produktif ini, jika dikelola dengan cermat oleh BMT, benar-benar dapat menggerakkan ekonomi mikro yang mampu menyerap banyak orang. Perusahaan mikro, kecil, dan menengah telah ditunjukkan dalam berbagai penelitian sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB. BMT merupakan lembaga penunjang peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro berdasarkan prinsip syariah, menurut terminologi Pinbuk. Kegiatan Baitul Maal meliputi penerimaan dan pengeluaran uang zakat, infaq, dan sedekah, sedangkan Baitut Tamwil meliputi penciptaan usaha produktif dan investasi dalam peningkatan kualitas usaha mikro ekonomi, serta mendorong tabungan dan pembiayaan.

BMT sejauh ini tergolong sebagai lembaga keuangan mikro bukan bank. Hal ini karena BMT diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur tentang perkoperasian. LKM dipisahkan menjadi bank dan bukan bank dalam kategori Bank Indonesia, menurut Budiantoro (2003). BRI Unit Desa, BPR, dan BKD adalah bank berwujud (Badan Perkreditan Desa). Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Dana Perkreditan Rakyat (LDKP), Baitul Mal Wa' Tanwil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Arisan, Pola Pembiayaan Grameen, Pola Pembiayaan ASA, Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM), Credit Union, dan lain-lain adalah contoh lembaga non perbankan. Aspek terpenting dari keberadaan BMT dalam memberdayakan potensi ekonomi ini adalah keunggulannya di berbagai bidang, antara lain:

Pertama, BMT menggunakan prinsip syariah, dengan pola yang melibatkan mitra yang berinteraksi bukan hanya hubungan antara lembaga keuangan dan pelanggan dalam rangka menyalurkan bantuan keuangan dan kemudian hanya mengumpulkan simpanan, seperti yang terjadi pada bank dan lembaga keuangan

tradisional. Akibat dari struktur pembagian risiko ini, keberhasilan mitra sama dengan keberhasilan BMT, sedangkan penurunan mitra dalam manajemensama dengan penurunan BMT. Sebagai hasil dari pengaturan pembagian risiko ini, BMT akan lebih agresif dalam membela kepentingan mitranya, termasuk membantu mereka dalam mengembangkan bisnisnya.

Kedua, BMT merupakan wadah yang memungkinkan terbentuknya bibit-bibit wirausaha baru di kalangan kelompok usia produktif yang masih menganggur di Indonesia, karena pola risk sharing yang menjadi pedoman hubungan kerjasama dan kolaborasi antara BMT dengan mitranya di atas.

Ketiga, tidak seperti lembaga keuangan syariah lainnya seperti bank yang sulit menjangkau masyarakat termiskin, BMT merupakan lembaga yang berpotensi menjangkau masyarakat termiskin, seperti yang diprediksikan oleh Microcredit Summit 1997 tentang peran lembaga keuangan syariah. lembaga keuangan mikro. Sebab, tujuan ideologis landasan Islam yang digali adalah mengangkat posisi mustad'afin. Ide ini sebanding dengan Inklusi Keuangan, yang berupaya meningkatkan akses ke layanan keuangan, terutama untuk usaha kecil dan menengah.

#### **b. Strategi Optimalisasi Baitul Mal Dalam Meningkatkan Financial Inclusion di Kota Medan**

Pemerintah dan Bank Indonesia telah merencanakan berbagai kegiatan di sekitar lima pilar "Strategi Nasional Keuangan Inklusif" untuk membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Edukasi Keuangan adalah pilar pertama. Pilar ini mengacu pada inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk dan layanan keuangan. Setidaknya ada tiga kegiatan edukasi, antara lain pengenalan produk keuangan (tabungan, kredit, sistem pembayaran, dan asuransi/dana pensiun), perlindungan konsumen, dan pengelolaan keuangan. Inisiatif "Datanglah ke Bank" dan situs web Informasi dan Edukasi Konsumen adalah dua contoh.

Kelayakan Finansial adalah pilar kedua. Kesulitan internal merupakan salah satu hambatan yang dihadapi masyarakat miskin dan UMKM dalam hal layanan perbankan. Pertimbangan pertanyaan legalitas. Banyak usaha kecil yang masih kekurangan badan hukum, izin perusahaan, dan persyaratan teknis lainnya. Inisiatif BI untuk menetapkan peringkat kredit UMKM dan mengembangkan klaster UMKM. BI juga sedang menggarap Financial Identity Number (FIN) yang mirip dengan skema Single Identification Number (SIN) yang dijalankan Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan adalah pilar ketiga. Pemerintah dan BI akan memberikan dukungan kebijakan melalui penyusunan undang-undang yang memudahkan masyarakat luas dalam menerima layanan keuangan. BI, Kemenkop UKM, dan Kemenkominfo sedang menjajaki pengaturan distribusi berbasis teknologi

seperti e-payment, branchless banking, dan agen pihak ketiga (termasuk mobile phone banking).

Fasilitasi Intermediasi merupakan pilar keempat. Pilar ini menitikberatkan pada upaya penyadaran terhadap ciri-ciri kelompok masyarakat yang potensial (bankable) dalam rangka memperoleh layanan keuangan di antara lembaga keuangan formal. Linkage program, bazaar intermediasi UMKM, baseline survey, model pinjaman, dan dukungan UMKM hanyalah beberapa contoh kerja BI. Atau, pertimbangkan untuk meningkatkan pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD).

Saluran Distribusi adalah pilar kelima. Pilar ini berupaya memperluas jangkauan layanan lembaga keuangan formal kepada kelompok masyarakat di lokasi yang jauh. Misalnya, peningkatan jaringan kantor pos atau kerjasama dengan APEX Bank dalam implementasi BPR. Atau, proyek percontohan untuk implementasi uang seluler.

## **KESIMPULAN**

Percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat strategi penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Optimalisasi kontribusi sektor ini dengan memberikan akses seluasnya kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan, seperti UMKM, merupakan komponen penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, perlu dilakukan upaya untuk mendorong pemanfaatan sektor keuangan dalam perekonomian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan merupakan motor penggerak pembangunan dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan menghilangkan segala hambatan akses masyarakat terhadap layanan yang menjangkau semua kalangan. Financial Inclusion, juga dikenal sebagai inklusi keuangan, adalah inisiatif luas yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan harga dan non-harga terhadap akses publik ke layanan keuangan. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah organisasi keuangan mikro yang paling hemat biaya dan cara paling nyaman untuk mendapatkan dana kredit (pinjaman). Karena masalah pinjam-meminjam piutang merupakan salah satu yang tidak dapat diselesaikan melalui kegiatan ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A Prasetyantoko, Jakarta: LP3ES, 2012. et al, Pembangunan Inklusif : Prospek dan Tantangan Indonesia,
- A. Johansyah 2011, Difi, News Letter Bank Indonesia.
- Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa Bandung: alfabeta, 2010, "Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer".
- Al falah, "Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah," dalam Journal of Islamic Economics.

- Alamsyah, Halim "Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah. Alma 2017, Manajemen, Bandung: Salemba empat.
- Amin A.A.D 2017, Hassan."Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan", Jakarta: Pradnya Paramita.
- Budiantoro Tahun II No 8, Nopember 2003, Jurnal Ekonomi Rakyat. Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. Al - Qur'an Terjemahan. Jakarta. PT. Syamil Cipta Media
- Desiyanti vol. 2, no.3, Rika "Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Indeks Utilitas UMKM di Padang".
- Dusuki 2015, Arsyaf Wajdi, Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Edellius Jakarta: Rineka Cipta, 1992, et al., "Pengantar Ekonomi Perusahaan". Gerai Info, Edisi XV. News Letter BI.
- H Kara Yogyakarta: UII Press, 2005., Muslimin, Bank Syariah di Indonesia: "Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah",
- Hakim, Cecep Maskanul. 1995. Konsep Pengembangan Baitul Mal. Paper Seminar Ekonomi Islam ICMi Bandung.
- Irmawati JEJAK Journal of Economics and Policy, vol. 6, no.2, Setyani "Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan,".
- Jamal Lulail Yunus 2017, "Manajemen Bank Syari'ah", UIN-Malang Press, Noor Jakarta 2011, Rizana. Wujud Peran Aktif Indonesia Dalam Forum Inklusi Keuangan Global. Paper Seminar BI-OECD.
- Pandapotan, P., & Soemitra, Andri. (2022). Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid . *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 584-598. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.941>
- Qaradhawi, Yusuf. 1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta : Gema Insani Press.
- Tim DD-FES-BMT. 1997. Pedoman Kemitraan Dompot Dhuafa Republika- FES-BMT. Jakarta : Dompot Dhuafa Republika.
- Wibowo Purnomo. Juni 2011, Pungky. Financial Inclusion Harapan dan Sasaran, Rubrik Ikhtisar.
- Zallum, Abdul Qadim. 1983. Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah. Cetakan I. Beirut : Darul 'Ilmi Lil Malayin.